

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ashshofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Az, Lukman Santoso. 2017. *Anti Bingung Beracara di Pengadilan dan Membuat Surat Kuasa*. Yogyakarta: Laksana.
- Bawengan, G. W. 1988 *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Dewi, Erna & Firganefi. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Effendi, Tolib. 2016. *Praktik Peradilan Pidana*. Malang: Setara Press.
- Fajar, Mukti dan Achmad Yulianto. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, Jur Andi. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Handayani, Febri. 2016. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Hiariej, Eddy .O.S. 2012 *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Husin, Kadri dan Husin Budi Rizki. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Marzuki, Pater Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Mulia.
- Muhammad, Rusli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dilengkapi Dengan 4 Undang-Undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: UII Press.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Prespektif Teoritis dan Praktik Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- Oktoberina, Sri Rahayu & Savitri Niken. 2011. *Butir-Butir Pemeikiran dalam Hukum*. Bandung: Rafika Aditama.

- Priyanto, Anang. 2012. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Rosyadi, Rahmat & Hartini Sri. 2003. *Advokat dalam Prespektif Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta.
- Setiadi, Edi dan Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sinaga, Harlen. 2011. *Dasar-Dasar Profesi Advokat*. Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesi.
- Sofyan, Andi Muhammad & Asis Abd. 2017. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Sumardjono, Maria SW. 2014. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Syaiful, Bakhri. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan, Teori, dan Praktik Peradilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Peraktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wantu, Fence M. 2011. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Reviva Cendekia.
- Wlas, Lasdin. 1989. *Cakrawala Advokat Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- YLBHI. 2014. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

## **B. Karya Ilmiah**

- Anshori, Anung, Kedudukan Dan Peranan Paralegal Dalam Aktivitas Bantuan Hukum Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, *tesis Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung*, Bandung, 2014.

Inkananda, Festy, "Implementasi Kewajiban Advokat dalam Pendampingan Perkara Perdata Secara Pro Bono Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di Sleman", *skripsi* Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017.

Sihotang, Lolo Hendry, Peran Penasihat Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Kasus Narkotika Di Pengadilan Negeri Sleman, *skripsi* Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomo 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41/KMA/IV/2009 tentang Tanggapan MA atas fatwa Mahkamah Agung prihal beracara LKBH kampu.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberi Bantuan Hukum.

#### **D. Putusan**

Putusan Mahkamah Konstitusi dengan perkara Nomor 006/PUU-II/2004 Prihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 88/PUU-X/2012 Prihal Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik.

#### **E. Wawancara**

Wawancara dengan salah satu penyidik Polres Kota Gorontalo yaitu Kanit Pidum Polres Kota Gorontalo AIPDA Nirwan Damopolii, S.H.

Wawancara dengan beberapa Pemberi Bantuan Hukum selain Advokat (Paralegal) pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo yaitu Siska H. Boku, S.H., Elfina Harun S.H., Mohammad T. Lasena, S.H., Suparlin Djabi, S.H., dan Maryam Kadir, S.H.

Wawancara dengan salah satu pejabat fungsional hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo yaitu Fatchu Rocham, S.H.

Wawancara dengan beberapa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Gorontalo yaitu Heru Hamdani, S.H., M.H., Santo Musa, S.H., Indrayani, S.H., M.H., dan Nurul Wahida .R. S.H., M.H.